

Mengatur Pembiayaan

Prasyarat untuk menerapkan Kerangka Kerja Keanekaragaman Hayati Global

Pendahuluan: Pembiayaan dan Kerangka Kerja Keanekaragaman Hayati Global

Pada Desember 2022, hampir semua Pemerintah dunia berkomitmen secara formal untuk menghentikan hilangnya keanekaragaman hayati pada tahun 2030 dengan menerapkan Kerangka Kerja Keanekaragaman Hayati Global (GBF). Namun seperti yang disimpulkan dalam laporan State of Finance for Nature yang diterbitkan PBB pada Desember 2023 lalu, para Pemerintah ini masih belum melakukan tindakan yang dijanjikannya. Laporan ini menyimpulkan bahwa aliran keuangan swasta ke konservasi keanekaragaman hayati berjumlah kurang dari 1% dari aliran keuangan swasta yang dikucurkan bagi kegiatan yang membahayakan keanekaragaman hayati. Sementara itu, aliran keuangan publik yang membahayakan jumlahnya 10 kali lipat lebih besar dibandingkan investasi publik untuk upaya konservasi. Jelas terlihat bahwa memobilisasi sumber daya untuk konservasi keanekaragaman hayati terlihat tidak begitu logis mengingat begitu besarnya mayoritas sumber daya yang terus disalurkan untuk tujuan yang bertolak belakang dengan konservasi. Berdasarkan alasan tersebut, para Pemerintah berkomitmen untuk secara progresif menyelaraskan semua aliran keuangan dengan GBF (target 14 GBF). Para Pemerintah juga berkomitmen untuk mengidentifikasi dan meniadakan subsidi dan insentif salah sasaran lainnya yang dapat memunculkan hilangnya keanekaragaman hayati (target 18 GBF). Para Pemerintah saat ini tengah mendiskusikan cara menyelaraskan strategi mobilisasi sumber daya Konvensi Keanekaragaman Hayati (CBD) dengan berbagai target ini beserta target untuk kepastian pembiayaan yang memadai (target 19 GBF). Selain itu, para Pemerintah juga menyetujui target untuk melakukan tindakan hukum, administratif, atau langkah kebijakan guna memastikan lembaga keuangan mengungkapkan secara transparan

dampak yang ditimbulkannya terhadap keanekaragaman hayati ... guna mengurangi dampak negatif secara progresif (target 15 GBF).

Dokumen ringkasan ini menyoroti alasan regulasi dan komitmen yang mengikat untuk menjalankan target krusial ini menjadi prasyarat guna menerapkan GBF secara keseluruhan, serta alasan inisiatif sukarela yang dimotori perusahaan merupakan suatu distraksi yang berbahaya bagi regulasi dan komitmen tersebut karena inisiatif ini telah terbukti tidak efektif atau bahkan kontraproduktif terhadap GBF.

Masalah: Aliran Keuangan Publik dan Swasta yang Membahayakan Keanekaragaman Hayati

Sektor keuangan memberikan dampak luar biasa terhadap keanekaragaman hayati karena sektor ini menyalurkan kredit dan modal bagi kegiatan yang menyebabkan dampak lingkungan. Laporan [Banking on Biodiversity Collapse tahun 2023](#) menunjukkan bahwa sekurangnya \$307 miliar dalam bentuk kredit telah disalurkan untuk sektor-sektor utama yang berisiko terhadap hutan tropis sejak tahun 2016 hingga September 2023. Laporan [Bankrolling Ecosystem Destruction tahun 2024](#) memperkirakan bahwa lebih dari 1 triliun dolar AS dalam bentuk kredit global disalurkan ke grup perusahaan besar yang terlibat dalam sektor yang disebut sebagai sektor ekosistem berisiko, yakni komoditas pertanian yang berkaitan dengan risiko deforestasi; sektor yang menggunakan masukan komoditas tersebut dalam jumlah besar untuk menghasilkan pakan hewan; sektor yang menyerap pakan ini dalam kuantitas besar; dan sektor kayu dan pulp kayu, sejak diterapkannya Persetujuan Paris tahun 2015. Laporan [Deforestation Dividends](#) menyimpulkan bahwa antara tahun 2016 dan 2020, lembaga-lembaga keuangan menghasilkan pendapatan sebesar 1,54 miliar dolar AS dari portofolio yang terdiri dari 20 perusahaan agroindustri yang berisiko deforestasi. Demikian pula, laporan [Banking on Climate Chaos](#) menunjukkan bahwa 60 bank terbesar di dunia telah mengucurkan sebanyak 6,9 triliun dolar AS ke industri bahan bakar fosil selama 8 tahun terakhir sehingga menyebabkan kekacauan iklim, hilangnya keanekaragaman hayati, dan dampak mematikan terhadap masyarakat setempat.

Subsidi yang salah sasaran dan aliran keuangan publik yang berbahaya lainnya terus menjadi penyebab signifikan hilangnya keanekaragaman hayati. Diperkirakan sebanyak 1,69 triliun dolar AS telah dihabiskan para Pemerintah di dunia untuk subsidi yang membahayakan dan insentif salah sasaran lainnya pada tahun 2022, termasuk estimasi sebesar 345 miliar dolar AS untuk subsidi pertanian yang membahayakan dan 160 miliar dolar AS untuk subsidi yang membahayakan di sektor kehutanan.

Secara total, aliran keuangan publik dan swasta yang menyebabkan hilangnya keanekaragaman hayati dan bahaya lingkungan hidup terkait meningkat hingga 7 triliun dolar AS pada 2023, sedangkan yang dikeluarkan untuk konservasi atau restorasi keanekaragaman hayati hanyalah sebesar 200 miliar dolar AS ([UNEP, 2023](#)). Terlihat jelas bahwa komitmen yang mengikat untuk menghapus aliran keuangan yang berbahaya ini merupakan prasyarat untuk mencapai tujuan GBF, yakni menghentikan dan mengembalikan hilangnya keanekaragaman hayati pada 2030.

Solusi yang Keliru: Kegagalan Inisiatif Sukarela yang dimotori Perusahaan pada Sektor Keuangan

Pembaruan draf strategi mobilisasi sumber daya, yang akan dibahas dalam pertemuan ke-4 Badan Pendukung Pelaksanaan (*Subsidiary Body on Implementation/SBI*) CBD, mengakui perlunya keselarasan antara aliran keuangan publik dan swasta dan GBF. Dalam rekomendasinya yang cenderung bertentangan, dinyatakan pula dukungan terhadap Gugus Tugas Pengungkapan Keuangan terkait Alam (TNFD) sebagai alat bantu untuk mencapai keselarasan ini, meski faktanya inisiatif sukarela seperti ini sangat tidak selaras dengan GBF, dan telah terbukti sudah gagal di masa lalu.

Kerangka TNFD, yang diluncurkan secara resmi pada September 2023, disusun oleh gugus tugas perusahaan yang tidak melibatkan perwakilan pemerintah, akademisi, NGO, atau kelompok pemegang hak. Kerangka ini menyajikan panduan pelaporan sukarela bagi perusahaan, termasuk lembaga keuangan. Kerangka ini tidak sejalan dengan target 15 GBF, yang mewajibkan para Pemerintah untuk memastikan bahwa dampak tidak hanya dilaporkan, tetapi juga diatasi. Lebih buruknya lagi, rekomendasi awal TNFD bahkan tidak mengharapkan perusahaan untuk mengungkapkan dampak negatifnya terhadap keanekaragaman hayati. Kerangka ini sendiri utamanya mewajibkan pengungkapan informasi yang berupa "material" dari segi keuangan, yang artinya risiko hanya akan dilaporkan jika risiko dapat berdampak terhadap kepentingan keuangan "calon" investor di perusahaan, kecuali dinyatakan berbeda dalam undang-undang nasional. Dengan mengecualikan pelaporan dampak secara penuh, kerangka ini mengadvokasi standar yang lebih lemah daripada yang telah ada dalam undang-undang, misalnya di Uni Eropa, dan yang tengah dalam pembahasan di Tiongkok. Dalam banyak kasus, dampak negatif hilangnya keanekaragaman hayati ditanggung masyarakat umum. Hilangnya keanekaragaman hayati, yang sering kali sangat sarat gender, berdampak terhadap Masyarakat Adat dan masyarakat setempat yang menggantungkan hidup kepada hutan atau ekosistem lain sebagai mata pencaharian, dan masyarakat secara keseluruhan. Selain itu, laporan Bank Dunia tahun 2021 menyoroti bahwa negara-negara berpendapatan rendah dan menengah akan menanggung dampak ekonomi 10 hingga 15 kali lipat lebih besar akibat hilangnya keanekaragaman hayati dibandingkan negara berpendapatan tinggi. Perusahaan kaya yang menyebabkan bahaya sering kali justru menjadi pihak terakhir yang menanggung dampak yang ditimbulkannya.

Bahkan, investor tidak mendapatkan manfaat dari panduan TNFD karena perusahaan bahkan tidak diwajibkan, contohnya, untuk melapor bila perusahaan menghadapi pengaduan serius terkait kerusakan keanekaragaman hayati atau pelanggaran hak asasi manusia (HAM). Menurut The Canary, anggota TNFD sendiri menghadapi sebanyak 300 tuduhan terkait hak selama 10 tahun terakhir. Meski demikian, TNFD tidak mewajibkan anggotanya membuat mekanisme penanganan pengaduan dan/atau membayar penggantian dan kompensasi jika anggotanya ditemukan bertanggung jawab atas bahaya keanekaragaman hayati terhadap masyarakat tertentu. TNFD juga tidak mewajibkan perusahaan mengungkapkan di mana lokasi operasional perusahaan, atau dari mana perusahaan melakukan pembelian, yang membuat masyarakat setempat tidak dapat memverifikasi apakah perusahaan atau bank tertentu berhubungan dengan hilangnya keanekaragaman hayati di wilayahnya. TNFD juga memperbolehkan investor untuk menentukan secara bebas data mana yang ingin diungkapkan investor dan menentukan metodologi yang digunakan untuk

mengumpulkan data tersebut. Keadaan ini membuat auditor independen atau aktor lainnya tidak dapat memverifikasi apakah data ini benar, dan justru sepenuhnya memastikan bahwa data-data ini tidak akan konsisten dan dapat dibandingkan satu sama lain. TNFD tidak mengindikasikan apa yang akan terjadi ketika ada suatu lembaga keuangan, atau perusahaan lain, yang menggunakan pelaporan TNFD untuk melakukan *greenwashing* dan membagikan informasi yang jelas keliru atau menyesatkan.

Inisiatif sukarela perusahaan telah terbukti tidak efektif dan tidak sesuai pula dengan kesepakatan CBD dan GBF. Analisis tentang kebijakan yang berisiko terhadap hutan di lebih dari 100 lembaga keuangan menyimpulkan bahwa meski ada sejumlah perbaikan kecil sejak tahun 2016, "tetap ada bahasa yang tidak gamblang, kerangka waktu yang tidak jelas, dan celah lainnya, sehingga membuat fasilitasi pelanggaran HAM dan deforestasi terus berlangsung." (BOBC, 2023)

Tinjauan independen tentang inisiatif perusahaan yang pernah diterapkan pada sektor keuangan, yakni "Kesepakatan Komoditas Lunak" (*Soft Commodities Compact*), menunjukkan bahwa pencapaian targetnya secara keseluruhan telah gagal. Sebanyak 12 bank yang mendaftar dalam kesepakatan ini nyatanya telah meningkatkan investasinya terhadap perusahaan yang berisiko terhadap hutan dalam kurun waktu 6 tahun kesepakatan tersebut berlaku, dan bank bahkan tidak mampu mematuhi komitmen bahwa semua nasabahnya harus secara sukarela bergabung dalam skema sertifikasi berkelanjutan. Skema sertifikasi yang digunakan bank sebagai jaminan untuk keberlanjutannya pun tengah mendapatkan kritik tajam. Analisis menemukan adanya kesenjangan kritis dalam skema sertifikasi Roundtable on Sustainable Palm Oil, sedangkan Forest Stewardship Council telah ditemukan secara umum memiliki "dampak minimal terhadap deforestasi hutan tropis", dan audit independen terhadap Round Table on Responsible Soy menyimpulkan bahwa perusahaan bersertifikat "menunjukkan gagal tercapainya manfaat sosial atau lingkungan mana pun".

Solusi Sesungguhnya: Perlunya Regulasi dan Komitmen yang Mengikat dan Ambisius dalam Strategi Keanekaragaman Hayati Nasional dan Rencana Aksi (NBSAP)

Konvensi Keanekaragaman Hayati merupakan instrumen yang mengikat secara hukum, dan sudah jelas bahwa pendekatan yang menggunakan inisiatif sukarela yang dimotori perusahaan tidak akan membuat para Pemerintah dapat mencapai target yang telah ditentukan berdasarkan GBF guna memastikan kepatuhan terhadap Konvensi. Sebaliknya, kepatuhan tersebut mensyaratkan regulasi yang mengikat secara hukum terhadap sektor keuangan guna memastikan bank dan lembaga keuangan lainnya menghentikan pembiayaan yang merusak planet kita. Regulasi ini mewajibkan para Pemerintah untuk melakukan reformasi yang segera dan menyeluruh terhadap semua subsidi atau sistem insentif lainnya sehingga sistem-sistem tersebut memfasilitasi transisi yang adil menuju ekonomi berkelanjutan dan berkeadilan gender yang melestarikan dan memulihkan keanekaragaman hayati. Demikian pula, regulasi ini mewajibkan komitmen yang mengikat guna memastikan telah dimobilisasinya sumber daya yang memadai untuk menjaga penerapan GBF.

Langkah hati-hati pertama untuk mengatur sektor keuangan adalah memastikan telah dijalanannya kepatuhan sektor keuangan terhadap kesepakatan keanekaragaman hayati dan lingkungan lainnya. Misalnya, French Duty of Vigilance Law mensyaratkan perusahaan multinasional besar, termasuk lembaga keuangan yang beroperasi di Prancis untuk membuat rencana yang mencakup semua kegiatan internasional yang “mencakup langkah uji tuntas yang wajar guna mengidentifikasi risiko dan mencegah pelanggaran serius terhadap HAM dan kebebasan dasar manusia, kesehatan dan keselamatan masyarakat dan lingkungan, yang muncul akibat kegiatan perusahaan dan kegiatan lain yang dilakukan berbagai perusahaan yang berada di bawah kendalinya.” Hal yang paling penting adalah, undang-undang dari Prancis ini juga memungkinkan masyarakat untuk mengupayakan pemulihan atas kerugian yang dialami.

Tiongkok telah menerapkan Panduan Pembiayaan Hijau bagi Industri Perbankan dan Asuransi, yang memerintahkan bank dan perusahaan asuransi untuk secara ketat membatasi pembiayaan terhadap industri-industri yang menghadapi risiko lingkungan dan sosial yang signifikan. Panduan ini sayangnya tidak mengikat secara hukum, tetapi diharapkan ketentuan utamanya akan disertakan dalam Undang-Undang Tiongkok tentang Bank Komersial yang saat ini tengah direvisi. Uni Eropa telah memperkenalkan kewajiban pelaporan keberlanjutan bagi perusahaan tertentu, termasuk bank dan perusahaan asuransi pada tahun 2025 dan setelahnya. Pelaporan wajib ini menerapkan standar pelaporan terperinci mengenai keanekaragaman hayati dan ekosistem yang menguraikan persyaratan pengungkapan yang harus memungkinkan penggunaannya untuk dapat memahami kesesuaian strategi dan model bisnis perusahaan berdasarkan target kebijakan publik tingkat lokal, nasional, dan global yang berkaitan dengan keanekaragaman hayati dan ekosistem, termasuk GBF.

Sementara itu, Regulasi tentang Produk Bebas Deforestasi yang belum lama diterapkan Uni Eropa sejauh ini telah mengecualikan sektor keuangan. Pengecualian ini membuat lembaga keuangan Uni Eropa dapat membiayai perusahaan dan komoditas yang memicu deforestasi, yang membuat produknya akan dilarang masuk Uni Eropa. Komisi Eropa tengah menyiapkan penilaian dampak tentang perlunya menyediakan kewajiban hukum khusus bagi lembaga keuangan. Meski tonggak Petunjuk Uji Tuntas Keberlanjutan Perusahaan membatasi persyaratan uji tuntas bagi lembaga keuangan terhadap pemasok hulunya, aturan ini menugaskan Komisi Eropa untuk menyampaikan laporan mengenai perlunya menguraikan persyaratan uji tuntas keberlanjutan tambahan berkenaan dengan kegiatan peminjaman dan investasi dalam kurun waktu dua tahun setelah diberlakukan. Tinjauan ini memberikan peluang terhadap tindakan legislatif untuk mengatur sektor keuangan Uni Eropa, yang saat ini bertanggung jawab terhadap lebih dari 22% seluruh aliran keuangan yang dialirkan ke produksi komoditas yang berisiko terhadap hutan, agar tidak mengucurkan pembiayaan untuk kerusakan keanekaragaman hayati.

Inisiatif lain yang lebih lemah, tetapi memiliki potensi menarik, adalah Taksonomi Keuangan Berkelanjutan yang diterapkan Uni Eropa pada tahun 2023, meski banyak mendapatkan kritik dan bahkan dipersoalkan secara hukum karena mengklasifikasikan bioenergi hutan dan hutan industri secara umum sebagai sektor berkelanjutan. Pemerintah Brasil telah memutuskan untuk mengecualikan kegiatan ternak industri dari obligasi negara berkelanjutan negaranya, sedangkan Malaysia telah menerapkan Value-based Intermediation Financing and Investment Impact Assessment Framework

pada November 2019. Pada tahun 2022, Indonesia memperkenalkan Taksonomi Hijau untuk mengakselerasi pembiayaan bagi sektor berkelanjutan.

Rekomendasi

Pemerintah dan regulator keuangan wajib menerapkan regulasi yang kuat guna memastikan dihentikannya pembiayaan yang menyebabkan runtuhnya keanekaragaman hayati, dan disalurkan sumber daya publik dan swasta untuk membiayai transisi yang berkeadilan. Pemerintah dan regulator keuangan wajib menerapkan regulasi yang:

- membentuk standar sosial dan lingkungan yang kuat dan mengikat secara hukum yang wajib dipatuhi lembaga keuangan. Selain berbagai persyaratan lain, standar ini wajib melarang pembiayaan deforestasi, degradasi hutan, dan konversi atau degradasi ekosistem alami, mengatur standar ambang batas polusi dan emisi yang tinggi, dan sepenuhnya melindungi HAM, dengan pertimbangan khusus bagi hak-hak Masyarakat Adat dan masyarakat rentan lainnya;
- mewajibkan uji tuntas yang kuat oleh lembaga keuangan terhadap semua jasa keuangannya, termasuk ke semua grup perusahaan nasabah;
- mewajibkan lembaga keuangan untuk memiliki persyaratan kontrak dan penerimaan nasabah terkait risiko keanekaragaman hayati dan HAM, termasuk dampak akibat ketidakpatuhan;
- mewajibkan lembaga keuangan untuk mengungkapkan:
 - nama proyek dan perusahaan (atau grup perusahaan) yang dibiayainya, termasuk perantara pembiayaan
 - dampak penuh lembaga keuangan terhadap keanekaragaman hayati dengan menggunakan metode yang memungkinkan data dapat tersedia secara publik dan diverifikasi secara independen, dan dapat diperiksa secara mendalam
 - pengaduan yang dihadapi lembaga keuangan mengenai dampak keanekaragaman hayati dan HAM;
- mewajibkan lembaga keuangan untuk menerapkan rencana transisi holistik, dengan metrik dan target jelas, yang mengatasi dampak keanekaragaman hayati, iklim, dan sosial dengan pendekatan sistematis;
- menetapkan secara jelas tanggung jawab lembaga keuangan atas kontribusinya terhadap dampak merugikan melalui pembiayaan atau investasinya di perusahaan-perusahaan yang menyebabkan kerugian;
- membentuk mekanisme untuk membuat lembaga keuangan bertanggung jawab atas dampak merugikan yang telah ditimbulkannya atau turut dilakukannya melalui pembiayaan dan investasinya. Mekanisme ini harus mencakup lembaga keuangan yang gagal dalam uji tuntasnya dan menyertakan mekanisme yang membuat manajemen senior bertanggung jawab, yang memberlakukan denda yang jauh lebih besar dibandingkan keuntungan yang diperoleh, dan mekanisme pemulihan beserta penggantian kerugian bagi masyarakat dan lingkungan terdampak.

Sebagai langkah paling awal, para Pemerintah harus menunjukkan secara jelas dalam Strategi Keanekaragaman Hayati Nasional dan Rencana Aksi (NBSAP) yang harus dipublikasikan sebelum KTT CBD berikutnya pada Oktober 2024 mendatang mengenai langkah-langkah peraturan yang direncanakan para Pemerintah untuk melarang pengalokasian modal publik atau swasta ke perusahaan dan sektor yang menyebabkan kerusakan ekosistem. Upaya ini dilakukan guna menyelaraskan semua aliran keuangan dengan tujuan GBF, yakni menghentikan dan membalikkan hilangnya keanekaragaman hayati pada tahun 2030.

Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi forestsandfinance.org atau hubungi forestsandfinance@ran.org atau simonelovera14@gmail.com

